

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENINGKATKAN SIKAP DEMOKRATIS SISWA KELAS XI DI SMAN 5 PEKANBARU

M. Fikri Isnaini Pramana ¹, Jumili Arianto², Kingkel Panah Grosman ³
^{1,2,3}PPKn FKIP Universitas Riau

¹m.fikri0586@student.unri.ac.id, ²jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id,

³kingkel.panahgrosman@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to understand how the implementation of democratic values in Pancasila Education learning can improve democratic attitudes among eleventh-grade students at SMAN 5 Pekanbaru. The background of this research stems from student behavior that shows a lack of democratic attitude, such as not respecting friends' opinions, low tolerance in group discussions, and a tendency to behave individualistically. This research applies a descriptive qualitative approach by gathering data through participant observation, in-depth interviews, and documentation. The informants involved in this study consisted of the vice principal of curriculum, the Pancasila Education teacher, and eleventh-grade students. Data analysis was carried out through the steps of data collection, data reduction, data display, and drawing conclusions, with data validity tested using source and technique triangulation. The results indicated that the implementation of democratic values in Pancasila Education has been carried out using group discussion methods, consensus building (musyawarah), freedom of expression, and habituating mutual respect in class. The teacher functions as a facilitator who creates opportunities for students to participate actively and serves as a model for democratic behavior. Students' democratic attitudes can be seen from their increased courage to express opinions, ability to respect differences, tolerance, and readiness to accept group decisions. Some challenges are still encountered, such as limited learning time, variation in student character, and the lack of active participation from all students in discussions. Overall, the implementation of democratic values contributes positively to enhancing students' democratic attitudes in daily social interaction.

Keywords: *Implementation, Democratic Values, Pancasila Education, Democratic Attitude.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat meningkatkan sikap demokratis di kalangan siswa kelas XI di SMAN 5 Pekanbaru. Latar belakang penelitian ini bersumber dari adanya perilaku siswa yang kurang menunjukkan sikap demokratis, seperti kurangnya menghargai pendapat teman, rendahnya toleransi dalam diskusi, serta kecenderungan untuk bersikap individualistis dalam proses pembelajaran. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi yang berasal dari Pancasila, terutama sila keempat. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang terlibat meliputi wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru Pendidikan Pancasila, dan siswa kelas XI. Analisis data dilaksanakan melalui langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila telah dilakukan dengan menggunakan metode diskusi kelompok, musyawarah, pemberian kebebasan berpendapat, serta membiasakan sikap saling menghargai. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang menciptakan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif. Sikap demokratis siswa dilihat dari meningkatnya keberanian menyampaikan pendapat, kemampuan menghargai perbedaan, toleransi, serta kesiapan menerima hasil kesepakatan.

Kata Kunci: Implementasi, Nilai-Nilai Demokrasi, Pendidikan Pancasila, Sikap Demokratis.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan elemen dasar dalam yang sangat krusial dalam menompang kemajuan suatu bangsa serta pengembangan potensi kemanusiaan secara menyeluruh. Pendidikan adalah komponen yang sangat penting bagi setiap manusia untuk meningkatkan sumber daya juga daya saing dalam kehidupan dan masa depan (Arianto et al., 2025). Pendidikan tidak semata-mata dipahami sebagai transfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) yang bersifat kognitif, melainkan sebuah

proses holistik untuk membangun nilai, kepribadian, akhlak mulia, dan karakter integratif di dalam masyarakat. Dengan cara demikian, pendidikan memegang peranan mutlak dalam mengarahkan orientasi moral suatu bangsa agar memiliki integritas dan martabat kebudayaan yang kuat (Nasution et al., 2022). Berlandaskan payung hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, secara tegas diamanatkan bahwa fungsi utama pendidikan nasional adalah

mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta membangun peradaban bangsa yang bermartabat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Di tengah arus globalisasi, modernisasi, dan transformasi digital yang melanda seluruh sektor kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu pilar nilai yang krusial untuk senantiasa diaktualisasikan dalam lingkungan institusi persekolahan adalah nilai-nilai demokrasi. Demokrasi dalam cangkupan kebangsaan Indonesia bukan sekadar dimaknai secara kecil sebagai sebuah mekanisme atau prosedur sistem pemerintahan semata, tetapi jauh melampaui itu, demokrasi dipandang sebagai falsafah hidup, kebiasaan berpikir, dan pandangan perilaku yang menempatkan harkat martabat manusia secara setara, adil, serta bertanggung jawab. Penerapan demokrasi di tanah air dikenal dengan prinsip Demokrasi Pancasila, sebuah paham kedaulatan rakyat yang secara substantif dijiwai dan dipandu oleh kelima sila Pancasila, khususnya sila keempat yang berbunyi 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan'. Oleh karena itu, iklim pembelajaran di dalam lingkungan formal sekolah wajib

didesain secara partisipatif, dialogis, toleran, terbuka, serta memuliakan kebebasan berpikir yang bertanggung jawab sebagai hak konstitusional peserta didik (Hutabarat et al., 2021).

Dalam struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, mata pelajaran Pendidikan Pancasila menempati posisi strategis dan mengemban tanggung jawab utama sebagai instrumen kurikuler untuk melaksanakan internalisasi nilai-nilai demokrasi tersebut. Pendidikan Pancasila dirancang bukan hanya sebagai pemenuhan beban administrasi kognitif hafalan teks historis, tetapi bertindak sebagai laboratorium sosial kewarganegaraan yang menuntun para siswa untuk mampu mentransformasikan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) menjadi watak kewarganegaraan yang matang serta perilaku sosial yang nyata dalam keseharian. Melalui pengelolaan pembelajaran yang akurat dan tepat sasaran, Pendidikan Pancasila memegang peranan krusial dalam melahirkan generasi muda atau warga negara yang cerdas, kritis, bertanggung jawab, serta memiliki komitmen kuat untuk memelihara tatanan demokrasi yang sehat (Rube'i & Suhaida, 2021).

Namun demikian, fakta empiris dan fenomena sosial yang terjadi di lapangan kerap kali memperlihatkan adanya kesenjangan yang mencolok antara cita-cita normatif kurikulum dengan realitas perilaku peserta didik sehari-hari. Berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan secara mendalam di lingkungan kelas XI SMAN 5 Pekanbaru, ditemukan indikasi gejala penurunan atau degradasi nilai-nilai sikap demokratis pada diri sebagian besar peserta didik. Di dalam dinamika pembelajaran di kelas, sering terlihat gejala kurangnya rasa saling menghargai pendapat antar-rekan ketika kerja kelompok sedang berlangsung, rendahnya tingkat toleransi terhadap keragaman sudut pandang pemecahan masalah, serta adanya dominasi ego sentris individu tertentu yang memaksakan kehendak pribadinya tanpa menghiraukan hak-hak berpendapat dari anggota kelompok lainnya. Selain itu, fenomena individualistik, sikap apatis, dan kurangnya rasa empati dalam penyelesaian tugas belajar bersama menjadi gambaran umum yang membutuhkan perhatian khusus.

Kondisi keprihatinan sosiologis ini diperkuat oleh pengakuan dan penu-

turan langsung dari pihak Guru Pendidikan Pancasila di SMAN 5 Pekanbaru. Guru Pendidikan Pancasila mengemukakan bahwa penanaman esensi sikap demokratis pada diri peserta didik pada kenyataannya masih menghadapi hambatan terhadap perilaku yang kompleks di ruang kelas.

Fenomena tersebut secara metodologis melahirkan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mendasar dan penting untuk dibahas lebih lanjut. Berbagai literatur ilmiah dan kajian terdahulu, seperti studi komparatif yang diselenggarakan oleh (Satria Aji et al. 2022), memberikan kesimpulan normatif bahwa kendala mendasar kegagalan penanaman nilai-nilai demokrasi di sekolah disebabkan oleh pola pembelajaran yang masih bersifat konvensional, monoton, terpusat pada guru (*teacher-centered*), serta sangat teoritis-tekstual tanpa memberikan ruang konkret bagi aktualisasi pengalaman langsung bagi para siswa. Akibatnya, siswa hanya menghafal pasal, asas, dan teori demokrasi untuk kebutuhan ujian reguler semata, tanpa pernah menyerap nilai tersebut ke dalam struktur pengetahuan afektif mereka untuk dipraktikkan dalam interaksi sosial.

Berpijak pada latar belakang permasalahan di atas, kajian ini dipandang sangat esensial untuk mengupas, mendeskripsikan, dan menganalisis secara komprehensif mengenai strategi, proses, dan model 'Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Meningkatkan Sikap Demokratis Siswa Kelas XI di SMAN 5 Pekanbaru'. Fokus dalam penelitian ini ditekankan pada bagaimana peranan inovatif dari guru Pendidikan Pancasila dalam merancang pembelajaran yang demokratis, pemanfaatan metode musyawarah di kelas, upaya mengatasi hambatan tentang perilaku individualistik siswa, serta bentuk dukungan ekosistem kultural sekolah secara keseluruhan dalam rangka membentuk kepribadian warga negara muda yang berkarakter luhur sesuai dengan koridor luhur Demokrasi Pancasila.

B. Metode Penelitian

Pendekatan metodologis yang diimplementasikan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analitis. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada karakteristik fokus masalah penelitian yang menuntut

pemahaman yang utuh, mendalam, naturalistik, mengenai fenomena sosial yang terjadi di lingkungan nyata. Pendekatan kualitatif dalam studi ini berupaya mengeksplorasi pola interaksi, tindakan, kebijakan, ujaran, serta makna tersembunyi di balik pelaksanaan internalisasi nilai demokrasi dalam kelas pembelajaran Pendidikan Pancasila tanpa melakukan manipulasi variabel (Giawa, 2024).

Lokasi dan subjek penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) di SMAN 5 Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Bawal Nomor 43, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penentuan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan karakteristik sekolah yang memiliki kompleksitas keragaman latar belakang sosial ekonomi dan budaya peserta didik, serta adanya urgensi pemecahan masalah perilaku demokratis siswa kelas XI. Proses pengambilan data lapangan dilaksanakan secara intensif dalam kurun waktu empat bulan, terhitung mulai dari bulan November 2025 sampai dengan Februari 2026, guna memastikan data yang diperoleh mencapai derajat kejenuhan yang memadai.

Data yang dihimpun dalam penelitian kualitatif ini dikelompokkan ke dalam dua jenis utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data autentik yang diperoleh peneliti secara langsung melalui interaksi interpersonal dengan para informan kunci di lokasi penelitian menggunakan teknik wawancara mendalam yang semi-terstruktur (Edrissy & Rozi, 2021). Guna memperoleh kedalaman variasi data, penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi tertentu, sehingga terpilih sebanyak 7 orang informan utama, meliputi: 1 orang Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang memahami regulasi kebijakan kurikuler sekolah; 1 orang Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila kelas XI (Ibu Hidayati, S.Pd., M.Si.) selaku aktor utama perancang pembelajaran; serta 5 orang peserta didik kelas XI yang aktif dalam proses pembelajaran di kelas, masing-masing bernama Khalisa Dinda Purnama, Fauza Nafla Husi, Josua Batubara, Sherinna Eka Sadina, dan Charissa Kayla Situngkir. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi berupa penelaahan dokumen kurikulum, Alur Tujuan Pembelajaran (ATP),

Modul Ajar/RPP Pendidikan Pancasila, catatan asesmen sikap, jurnal mengajar guru, foto kegiatan belajar, serta profil tata tertib kesiswaan di SMAN 5 Pekanbaru (David Tan, 2021).

Teknik pengumpulan data mengandalkan tiga instrumen utama yang saling melengkapi demi menjaga objektivitas penelitian, yaitu: (1) Observasi partisipatif pasif, di mana peneliti hadir di ruang kelas XI secara berkala untuk mengamati, mencatat, dan merekam secara langsung interaksi verbal dan non-verbal siswa, tata cara guru memandu diskusi, serta perilaku demokratis yang tampak selama pembelajaran Pendidikan Pancasila. (2) Wawancara mendalam, berpedoman pada panduan wawancara fleksibel guna mengeksplorasi persepsi, perasaan, hambatan, dan harapan informan terkait nilai demokrasi. (3) Studi dokumentasi, untuk mengumpulkan data-data administratif pendukung guna memperkuat keabsahan temuan tertulis (Ardiansyah et al., 2023).

Operasionalisasi analisis data dilakukan secara interaktif mengadopsi model analisis data kualitatif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Langkah-langkah analisis yang dilalui

meliputi empat tahapan yang simultan: pertama, pengumpulan data (*data collection*) dari seluruh catatan lapangan hasil wawancara, observasi, dan transkrip dokumen; kedua, reduksi data (*data reduction*), yaitu proses memilah, merangkum, memfokuskan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah menjadi informasi yang bermakna sesuai fokus masalah; ketiga, penyajian data (*data display*) dalam bentuk teks naratif deskriptif yang terstruktur, bagan, dan matriks tabel triangulasi; keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) yang dilakukan sejak awal menginjakkan kaki di lapangan secara tentatif hingga bermuara pada konklusi final yang kokoh (Wanto, 2018).

Untuk menjamin keabsahan, akurasi, keshahihan, dan objektivitas data yang telah disajikan, peneliti menerapkan teknik pengujian validitas data berupa teknik triangulasi. Triangulasi yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis: pertama, triangulasi sumber, dilaksanakan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif

(misalnya membandingkan hasil wawancara guru dengan penuturan para siswa dan keterangan staf kurikulum); kedua, triangulasi teknik, diterapkan dengan cara menguji kredibilitas data yang sama namun menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda (yakni mencocokkan data hasil wawancara dengan temuan riil pada lembar observasi kelas dan dokumen fisik Modul Ajar yang dimiliki sekolah) (Sugiyono, 2023).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengumpulan data secara mendalam melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tujuh informan, serta studi dokumentasi, di dapatkan gambaran utuh bahwa di SMAN 5 Pekanbaru telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam kultur sekolah dan kurikulum pembelajaran. Guru Pendidikan Pancasila, Ibu Hidayati, S.Pd., M. Si bertindak sebagai perancang utama rekonstruksi iklim demokrasi di tingkat kelas XI dengan menggeser paradigma lama yang berpusat pada guru menuju model pembelajaran aktif berbasis (*Student-Centered Learning*).

Proses implementasi nilai demokrasi ini diwujudkan ke dalam komponen perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Dalam perencanaan, guru menyusun Modul Ajar dengan menyisipkan dimensi Profil Pelajar Pancasila, khususnya dimensi Berkebinekaan Global dan Gotong Royong yang erat kaitannya dengan nilai-nilai demokratis. Pada tahap pelaksanaan di kelas, internalisasi nilai demokrasi dikonkritkan melalui skema diskusi kelompok kecil,

debat terbuka isu kontemporer, pembuatan kontrak kesepakatan bersama, serta pemberian kebebasan bagi siswa untuk menyampaikan saran yang membangun terhadap proses belajar.

Untuk memberikan pembuktian metodologis yang transparan dan valid terkait keabsahan temuan data lapangan, peneliti merangkum keseluruhan hasil uji kredibilitas data melalui instrumen matriks tabel triangulasi sumber dan teknik di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Triangulasi Data Implementasi Nilai Demokrasi

Aspek & Indikator	Hasil Wawancara (Triangulasi Sumber)	Hasil Observasi (Triangulasi Teknik)	Studi Dokumentasi (Triangulasi Teknik)
Kebebasan Berpendapat & Peran Guru	Siswa menyatakan guru memberi kesempatan berpendapat secara adil dan berperan sebagai mediator dalam diskusi.	Siswa aktif bertanya dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut dalam pembelajaran.	RPP/Modul Pendidikan Pancasila memuat kegiatan diskusi pada langkah inti pembelajaran.
Penanaman Nilai Musyawarah	Siswa dilibatkan dalam diskusi kelompok untuk memusyawarahkan pembagian tugas secara adil.	Terlihat pembagian peran yang jelas dalam kelompok (ketua, penulis, presenter).	Dokumentasi foto diskusi kelompok dan lembar kerja tugas kelompok siswa.
Toleransi dan Menghargai Perbedaan	Siswa menerima hasil mufakat meskipun pendapat pribadi tidak diterima.	Siswa tetap bersikap tenang, tidak konfrontatif, dan mendukung keputusan kelompok.	Dokumentasi foto proses wawancara dan kegiatan diskusi yang berlangsung kondusif.

Tanggung Jawab terhadap Aturan Bersama	Guru mengajak siswa menyusun kesepakatan kelas terkait kehadiran dan sanksi.	Siswa mematuhi aturan kelas sebagai bentuk komitmen bersama.	Dokumentasi proses kegiatan dalam kelas
Komitmen Budaya Sekolah	Pihak sekolah mendukung kebebasan berorganisasi dan kegiatan kesiswaan.	Tersedia ruang aktualisasi demokrasi melalui OSIS, ekstrakurikuler, dan simulasi pemilu.	Dokumen kebijakan sekolah dan program tahunan pembinaan kesiswaan.

Deskripsi dari tabel hasil triangulasi diatas, implementasi nilai-nilai demokrasi yang mencakup aspek kebebasan berpendapat, penanaman nilai musyawarah, toleransi, tanggung jawab terhadap aturan, dan komitmen budaya sekolah telah berjalan dengan konsisten dan saling mendukung di seluruh instrumen penelitian. Validitas data ini dapat dibuktikan melalui keselarasan antara hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi, sebagai contoh yaitu, kebebasan berpendapat dan peran guru yang terungkap dari pengakuan siswa mengenai kesempatan berdiskusi yang adil secara nyata terkonfirmasi melalui keaktifan siswa bertanya tanpa rasa takut saat diobservasi, serta diperkuat oleh dokumen RPP/modul Pendidikan Pancasila yang secara eksplisit memuat kegiatan diskusi pada langkah inti

pembelajaran. Pola integrasi yang kuat ini juga terlihat pada aspek lain, seperti penanaman nilai musyawarah melalui pembagian peran kelompok yang jelas serta bukti dokumentasi foto kegiatan, yang secara keseluruhan menegaskan bahwa pembiasaan nilai demokrasi bukan sekedar materi teoritis, melainkan telah diinternalisasi dan didukung secara sistematis melalui kebijakan serta iklim budaya sekolah yang kondusif.

Penjelasan lebih mendalam mengenai hasil temuan lapangan menunjukkan perubahan perilaku siswa di kelas XI SMAN 5 Pekanbaru. Pada awal semester, suasana kelas diwarnai oleh keengganan siswa untuk memberikan pendapat secara terbuka karena kekhawatiran akan penilaian salah atau ejekan dari sesama teman. Sikap individualistik dominan muncul ketika tugas mandiri

diberikan, sementara kerja kelompok hanya dikerjakan oleh satu atau dua orang siswa saja. Kondisi ini menuntut Langkah strategi dari Ibu Hidayati untuk merubah struktur interaksi sosial kelas melalui intervensi nilai demokrasi.

Langkah awal yang diterapkan adalah pembentukan kontrak kesepakatan belajar di awal semester. Kontrak kesepakatan belajar ini disusun melibatkan seluruh siswa kelas XI. Siswa diberikan kebebasan mengusulkan aturan yang akomodatif. Dampak positif dari penerapan kontrak kelas ini tercermin dari meningkatnya kesadaran hukum dan disiplin siswa. Berdasarkan data observasi, tingkat keterlambatan masuk kelas menurun secara signifikan karena siswa merasa memiliki beban moral untuk mematuhi aturan yang mereka formulasikan sendiri.

Nilai kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab diimplementasikan secara konsisten, guru membagi kelompok belajar yang mengombinasikan keragaman tingkat akademik, latar belakang sosial, dan watak personal siswa. Di dalam kelompok heterogen ini, siswa dipaksa secara sosial untuk berinteraksi, bernegosiasi,

dan berkompromi. Hasil wawancara mendalam dengan informan siswa (Khalisa Dinda Purnama dan Fauza Nafla Husi) mengungkapkan bahwa ruang diskusi kelompok menumbuhkan rasa percaya diri mereka untuk menyampaikan ide pikiran di hadapan publik. Siswa yang awalnya pasif berangsur berani menyuarakan gagasan tanpa ada tekanan intimidatif.

Pembahasan teoritis atas temuan empiris ini menegaskan bahwa proses internalisasi nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila berjalan linier dengan landasan filosofis Demokrasi Pancasila. Menurut Kaelan (2013) merumuskan bahwa karakteristik unik dari demokrasi di Indonesia terletak pada sintesis nilai kerakyatan yang dipandu oleh moralitas kebijaksanaan, keadilan sosial, dan penghargaan atas eksistensi sesama manusia. Demokrasi Pancasila menolak sistem mayoritas maupun egoisme minoritas. Praktik musyawarah yang dihidupkan di kelas XI SMAN 5 Pekanbaru membuktikan bahwa nilai luhur sila keempat Pancasila dapat dibiasakan ke dalam tindakan riil siswa sejak dini, bukan sekadar dipelajari sebagai materi hafalan.

Keberhasilan peningkatan sikap demokratis ini juga ditinjau dari teori perkembangan afektif dan karakter. Perubahan perilaku siswa dari yang semula individualistik menjadi toleran dan inklusif menunjukkan bahwa kompetensi kewarganegaraan yang dapat dibentuk melalui rekayasa lingkungan belajar. Pengalaman empiris siswa saat berinteraksi secara demokratis di kelas membangun kembali struktur pengetahuan mereka mengenai arti penting menghargai keberagaman ide pemikiran. Sejalan dengan indikator karakter demokratis yang diajukan oleh Hemafitria et al. (2015) serta diperkuat riset Nastiti (2023), pilar utama kedewasaan demokratis seorang warga negara diukur dari kemampuannya mengendalikan diri, bersikap terbuka (*open-minded*), mendengarkan dengan empati, serta menolak segala bentuk pemaksaan kehendak sepihak.

Di sisi lain, peranan guru Pendidikan Pancasila sebagai *role model* (teladan hidup) memegang posisi kunci yang tidak tergantikan. Menurut Sujianti et al. (2024) memaparkan bahwa efektivitas penanaman nilai karakter kualitatif sangat ditentukan oleh kredibilitas perilaku guru di mata

siswa. Di kelas XI SMAN 5 Pekanbaru, Ibu Hidayati memperlihatkan konsistensi sikap yang adil, objektif, tidak diskriminatif, serta akomodatif terhadap kritik saran dari siswa. Tindakan transparan ini memberikan pelajaran moral yang berharga bagi siswa mengenai esensi kesetaraan hukum dan sportivitas yang melandasi kebudayaan demokrasi.

Lebih jauh lagi, internalisasi nilai demokrasi di tingkat kelas didukung secara sinergis oleh ekosistem kultural di SMAN 5 Pekanbaru. Sekolah bertindak sebagai miniatur masyarakat demokrasi. Wawancara dengan staf kurikulum mempertegas komitmen manajemen sekolah dalam menyediakan ruang laboratorium kedaulatan bagi siswa. Melalui pelaksanaan Pemilihan Umum Ketua OSIS yang diselenggarakan secara berkala dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, siswa mendapatkan pengalaman elektoral yang nyata. Di samping itu, iklim keterbukaan informasi, kebebasan berorganisasi di lingkungan ekstrakurikuler, serta adanya saluran aspirasi formal bagi siswa ikut andil mempercepat laju pembentukan budaya kewarganegaraan yang demokratis di sekolah.

Kendati menunjukkan capaian yang positif, penelitian ini mendokumentasikan sejumlah kendala dan hambatan yang masih menahan efektivitas implementasi nilai demokrasi di lapangan. Hambatan pertama bersifat struktural-temporal, yaitu keterbatasan alokasi jam pelajaran Pendidikan Pancasila yang hanya berkisar 2-3 jam pelajaran per minggu. Durasi waktu yang sempit ini seringkali habis terpakai untuk penyampaian materi substantif dan pengerjaan tugas administratif, sehingga diskusi kelompok mendalam dan sesi refleksi nilai afektif menjadi kurang maksimal. Hambatan kedua berkaitan dengan variasi karakteristik kepribadian peserta didik yang sangat beragam. Terdapat sebagian kecil siswa yang memiliki kecenderungan bawaan introvert ekstrem atau mengalami kecemasan sosial (*social anxiety*), sehingga tetap memilih pasif dan enggan terlibat dalam hiruk-pikuk perdebatan kelompok meskipun stimulus nilai telah diberikan.

Tantangan kontemporer yang tidak kalah berat adalah pengaruh destruktif ekosistem digital media sosial terhadap pola komunikasi siswa. Menurut Arumsari et al. (2020) mengingatkan bahwa paparan budaya digital yang cenderung instan, egosentris,

penuh ujaran kebencian (*hate speech*), dan fenomena algoritma 'echo chamber' di media sosial berdampak pada lunturnya kesantunan berkomunikasi siswa saat bertatap muka secara langsung di dunia nyata. Siswa menjadi lebih mudah tersinggung dan reaktif ketika mendengarkan opini yang berseberangan dengan pemahaman mereka.

Untuk meminimalisir dampak hambatan tersebut, Ibu Hidayati menerapkan langkah mitigasi strategis yang solutif. Guru memodifikasi sistem penilaian dengan menyisipkan poin bonus partisipasi aktif bagi setiap siswa yang berani berbicara atau merespons pendapat teman, tanpa melihat benar atau salahnya substansi argumen. Pendekatan interpersonal secara terarah juga dilakukan di luar jam pelajaran terhadap siswa-siswa yang terindikasi pasif. Guru merangkul mereka, mencari menggali kendala psikologisnya, serta melakukan pemberian penugasan khusus yang bertahap untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka secara perlahan. Upaya terintegrasi ini terbukti mampu menekan jumlah dan angka kesenjangan partisipasi sosial di dalam kelas.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif, temuan empiris di lapangan, serta pembahasan teoritis yang mendalam, kesimpulan utama dari penelitian ini menegaskan bahwa implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di kelas XI SMAN 5 Pekanbaru telah terlaksana dengan baik, adaptif, dan sistematis. Keberhasilan ini dicapai melalui penerapan metode instruksional interaktif (seperti diskusi kelompok heterogen, musyawarah kelas, pemecahan masalah bersama) serta peletakan fondasi kontrak kesepakatan belajar di awal semester. Proses pembelajaran yang dirancang secara *Student-Centered* ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam menumbuhkan, menguatkan, dan meningkatkan sikap demokratis peserta didik. Indikator peningkatan karakter demokratis tersebut tercermin nyata dari tumbuhnya keberanian berpendapat, meningkatnya rasa percaya diri berbicara di ruang publik, sikap toleransi yang tinggi terhadap keberagaman pemikiran, kedewasaan emosional menerima penolakan argumen, serta komitmen moral mematuhi keputusan bersama.

Guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas internalisasi

nilai demokrasi demi melahirkan generasi warga negara yang berkarakter, peneliti mengajukan sejumlah rekomendasi strategis fungsional sebagai berikut: (1) Bagi Guru Pendidikan Pancasila, disarankan untuk konsisten merawat iklim inklusif di kelas, serta memperluas variasi model pembelajaran berbasis pengalaman nyata seperti menerapkan metode simulasi sidang parlemen atau sidang mahkamah konstitusi guna memberikan pemahaman demokrasi kenegaraan secara makro. (2) Bagi pihak SMAN 5 Pekanbaru, direkomendasikan untuk terus mempertahankan kebijakan tata kelola sekolah yang transparan, memberikan dukungan sarana prasarana yang memadai bagi aktivitas kesiswaan, serta menyelenggarakan program edukasi politik dan literasi digital kewarganegaraan secara berkala guna mengikis budaya apatisme politik. (3) Bagi Peserta didik Kelas XI, diharapkan dapat senantiasa menginternalisasikan dan membudayakan nilai-nilai sikap demokratis, toleransi, gotong royong, dan saling menghargai tidak hanya dalam batas ruang kelas formal, melainkan diaktualisasikan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, termasuk dalam

menjaga etika berkomunikasi di platform media sosial digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IH-SAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Arumsari, N., Septina, W. E., & Saputro, I. H. (2020). Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 5(1), 12–16.
- David Tan. (2021). Metodologi Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336.
- Delia, E., & Usiono. (2025). Peran Demokrasi Dalam Pendidikan Nilai dan Karakter Pelajar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(1), 46–53.
- Desrita, H., Susisofianti, & Januar. (2025). Sekolah Sebagai Miniatur Masyarakat: Kajian Teori Interaksionisme Simbolik Dalam Pendidikan. *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(4), 266–274.
- Diantari, Sukandi, & Suastika. (2018). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dan Sikap Demokratis Siswa pada Mata Pelajaran PKn Kelas VIII B SMP Mutiara Singaraja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 6(1), 1–10.
- Edrisy, I. F., & Rozi, F. (2021). Pene-gakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara). *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2), 98–109.
- Giawa, L. (2024). Penanaman Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran PPKn Di SMP. *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 37–51.
- Hemafitria, Octavia, E., & Novianty, F. (2015). Implementasi Sikap Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 173–182.
- Hutabarat, D. T. H., Sari, S. N., Kamil, T., Ramadhan, W. S., & Pangestu, I. (2021). Makna Demokrasi Pancasila. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (JHSSB)*, 1(1), 59–64.
- Arianto, J., Aganmar, M., Pratakumbayan, A., Maharani, A., Manullang, D. A., Az-Zakiy, M., & Santrilia, S. (2025). Penerapan Media Pembelajaran Interaktif Quizizz Sebagai Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Di Kelas XI ULP SMKN 1 Pekanbaru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 8336-8346.
- Kaelan. (2013). Pendidikan Pancasila (Edisi Reformasi 2013). Yogyakarta: Paradigma.
- Nasrullah, M., Budiono, & Tinus, A. (2018). Implementasi Nilai-Nilai

- Demokrasi Dalam Pembelajaran. *Jurnal Civic Hukum*, 3(2), 195–207.
- Nastiti, D. (2023). Peran Organisasi Mahasiswa Dalam Pembentukan Sikap Demokratis. *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(1), 64–76.
- Nasuton, F., Anggraini, L. Y., & Putri, K. (2022). Pengertian Pendidikan, Sistem Pendidikan Sekolah, dan Pengembangan Karakter Bangsa. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 3(2), 422–427.
- Rube'i, M. A., & Suhaida, D. (2021). Penanaman Nilai Demokrasi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Pada Mahasiswa Program Studi PPKn IKIP PGRI Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 97–108.
- Satria Aji, N., Hardati, P., & Esti, W. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Kultur Sekolah dan Pembelajaran PPKn. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 29-36.
- Sujianti, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2024). Peran Guru Sebagai Fasilitator dan Mediator Terhadap Keaktifan Siswa Mengungkapkan Pendapat Dalam Pembelajaran PPKn. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 145–152.
- Wanto, A. H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>
- Widiayati, L., & Patmisari, P. (2025). Analisis Peran Guru dalam Membangun Nilai-Nilai Demokrasi Siswa melalui Pembelajaran PPKn. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5532–5541.